

**Blue Economy daerah Pesisir Berbasis Kelautan dan Perikanan****Mursal Fajar Hakim** ☐

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
 Diterima April 2013
 Disetujui April 2013
 Dipublikasikan Mei 2013

Keywords:
 kelautan, perikanan, pesisir, pembangunan ekonomi, blue economy
 marine, fisheries, coastal, economic development, blue economy

Abstrak

Untuk melawan tantangan era globalisasi serta pasar bebas yang sedang menjadi tren dan budaya ekonomi dunia, Indonesia harus mempunyai kekuatan lebih untuk menjadi sebuah negara yang tangguh dalam perekonomiannya. Secara historis dan ideologis bangsa Indonesia sudah didoktrin untuk menjadi bangsa yang agraris dan menggunakan land base economic oriented sebagai pola pertumbuhan ekonominya. Namun hingga saat ini belum ada sebuah perekonomian yang kuat terkecuali kuatnya nilai konsumsi pasar dalam negeri, perlu ada penggalian kembali potensi pertumbuhan perekonomian yang ada sehingga mampu untuk menjadi bangsa yang tangguh akan krisis ekonomi global. Potensi yang belum tersentuh adalah Potensi Kelautan dan Perikanan yang sangat melimpah, Produk Domestik Bruto per tahun menunjukkan bahwa kelautan dan perikanan menyumbang 10,3% dengan tingkat pertumbuhan positif pada harga konstan. Dapat diartikan bahwa kontribusi sektor perikanan dan kelautan mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Dan tidak bisa dianggap remeh dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, Kesejahteraan masyarakat yang berada di pesisir sangatlah rendah, bahkan lebih rendah dari masyarakat yang berfokus pada pembangunan di sektor lain. Perekonomian Indonesia akan maju bila di dukung dengan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini sangat penting untuk menumbuhkan daerah pesisir yang masuk dalam tingkat kesejahteraan rendah sehingga perlu ada sebuah pembenahan kembali, lewat Penguatan sektor kelautan dan industri perikanan maka akan meningkatkan perekonomian daerah pesisir yang secara langsung akan meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan perikanan dan kelautan harus terstruktur dan sistematis sehingga tercipta sebuah sinergi antara stake holder. Sebagai bentuk penyelesaian struktur pembangunan perikanan dan kelautan maka perlu ada penguatan di segala sektor seperti, Penetapan kebijakan moneter dan fiskal yang pro pembangunan kelautan dan perikanan, Peningkatan pelestarian ekologi secara menyeluruh untuk keberlangsungan green economy yang nantinya membuat ketahanan sumber daya alam, Peningkatan kinerja dan pembangunan serta investasi pada sektor riil untuk mendapatkan devisa negara secara utuh. Dan pada capaian visi perlu ada sebuah persepsi dasar kepada masyarakat tentang Penguatan perekonomian pesisir berbasis Kelautan dan Perikanan.

Abstract

To counter the challenges of globalization and the free market that is becoming a trend and culture of the world economy, Indonesia should have more power to be a strong state in the economy. Historically and ideologically indoctrinated Indonesian nation has become a nation that agricultural land base and use as a pattern-oriented economic growth. But until now there is no a strong economy with the exception of the strong domestic market consumption value, there needs to be digging back potential economic growth potential so that no nation can afford to be tough going global economic crisis. Potential of the untapped potential of Maritime Affairs and Fisheries is very abundant, Gross Domestic Product per year shows that the marine and fisheries accounted for 10.3% with a positive growth rate at constant prices. Means that the contribution of fisheries and marine sector have developed an increasing trend. And can not be underestimated in its contribution to economic growth. However, the public welfare which was located on the coast very low, even lower than that focuses on community development in other sectors. Indonesia's economy going forward if supported by equitable level of social welfare, in this case it is important to grow the coastal areas that fall into the lower levels of well-being so that there is a need to reform again, through the strengthening of marine and fisheries sector will boost the economy of the coastal areas will directly increase the number of public welfare. Fisheries and marine development strategy should be structured and systematic so as to create a synergy among stake holders. As part of the completion of the development of fisheries and marine structures then there needs to be strengthened in all sectors such as, Determination of monetary and fiscal policies which pro development of marine and fisheries, increase the overall ecological conservation for sustainable green economy that will create resilience of natural resources, improved performance and development and investment in the real sector to earn foreign exchange for the country intact. And the achievement of the vision necessary to have a basic perception of the public about the coastal economy based Strengthening Marine and Fisheries.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

 Gedung C6 lantai 1, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
 E-mail: linda_didot@yahoo.co.id

Pendahuluan

Latar Belakang

Untuk melawan tantangan era perdanganan bebas dan globalisasi yang kian meluas maka pembangunan kembali perekonomian Nasional yang maju dan mandiri merupakan harga mati. Karena itu senantiasa diperlukan penggalian sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan secara simultan dapat memilih sumber pertumbuhan ekonomi yang sudah ada. Salah satu sumber yang paling potensial adalah maritim, yang jika di fokuskan lagi adalah pada kelautan dan perikanan. Hal ini didasarkan pada kecenderungan permintaan baik dalam pasar negeri maupun global terhadap komoditas kelautan dan perikanan yang semakin tahun terus meningkat. Indonesia digadang mampu untuk memproduksi komoditi kelautan dan perikanan serta jasa – jasa lingkungan yang sangat besar, dari mulai budidaya maupun penangkapan di alam.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki ± 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 juta km² pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). Sebagai negara kepulauan, wilayah maritim merupakan kawasan strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukkan bahwa wilayah maritime ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya. Untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya kemaritiman bagi pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan menjamin kepentingan umum secara luas (public interest), diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah maritim. Hal ini seiring dengan rancangan MP3EI untuk menormalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat melalui upaya pembangunan yang didasarkan atas sumber daya setempat (resource-based development), dimana sumberdaya maritim saat ini didorong pemanfaatannya, sebagai salah satu andalan bagi pemulihhan perekonomian nasional,

disamping sumberdaya alam darat.

Perbedaan prinsipil antara bangsa yang berpikir agraris dan bangsa yang terorientasi kepada maritim adalah: agaris bersifat *Inward looking*, sedangkan Maritime Oriented itu *Outward Looking*. *Inward looking* di artikan sebagai pandangan kedalam dan mengabaikan potensi strategis keluar, sedangkan sebaliknya pada *outward looking* di artikan sebagai pandangan pengembangan potensi strategis secara menyeluruh. Maritim harus bersifat *outward looking* dikarenakan potensi yang kaya disuatu negara harus di kembangkan secara luas terlebih lagi pandangan *outward looking* dapat membuka mata dunia untuk lebih termotivasi dalam berinvestasi kepada Indonesia. Secara historis Masyarakat indonesia telah di doktrin pada jaman penjajahan belanda sebagai negara agraris sehingga pola pandangan *inward looking* sangat ketara dikarenakan pada masa tersebut pandangan *outward looking* berbahaya untuk penjajahan belanda, celakanya sampai pada hari ini pemimpin pemerintahan dan lembaga penyelenggara pemerintahan tidak sadar dan terus melanjutkan pola pikir *inward looking* ini dan menganggap indonesia sebagai negara dengan pola dasar perekonomian agraris. Pola pikir ini dalam kenyataannya melahirkan apa yang terjadi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang *land base oriented*, baik dibidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan negara. Ini salah satu sebab mengapa perhatian kepada wilayah laut menjadi minim. Ditambah dengan problem pengertian salah kaprah mengenai Indonesia sebagai Negara Maritim, sebagai Negara kepulauan itu menimbulkan perbedaan perbedaan yang mempersulit penentuan kebijakan.

Pembahasan

Kesalahan Orientasi Pembangunan Sektor dasar

Hasil perjuangan yang berat mencapai pengakuan internasional Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yang kemudian tertuang dalam UNCLOS dalam praktik lebih dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada relevansinya dengan pembangunan. Karena Tidak adanya persatuan persepsi tentang laut, tentang manfaat laut, tentang fungsi laut, peranan laut bagi kehidupan kita sebagai bangsa dan Negara. Karena itu kebijakan mengenai laut berjalan secara sektoral, bahkan kadang-kadang secara sporadis. Padahal UNCLOS memberikan hal-hal yang berupa konsepsi yang sangat sistimatis untuk dipakai seba-

gai dasar menentukan pembangunan Indonesia sebagai Negara Maritim. Pada jaman Bung Karno pernah dicanangkan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan dan selalu disebut-sebut pernah menjadi sebuah Negara Maritim yang punya sejarah menakjubkan. Tetapi belum pernah disusun dalam sebuah konsepsi pembangunan khusus tentang pemanfaatan laut. Jaman Orde Baru seluruh pelaksanaan GBHN, Pelita I, II dan seterusnya orientasi pembangunan nasional didasarkan kepada apa yang dikenal sebagai *Land Base Oriented Development*. Inilah kesalahan pokok. Sebab, pembangunan dalam sebuah Negara akan berhasil dengan baik apabila pembangunan itu dilaksanakan berdasarkan atas kondisi obyektif Negara yang bersangkutan. Indonesia bukan sebuah Negara Kontinen, Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara. Seharusnya orientasi pembangunan berdasarkan pada kondisi obyektif tersebut, yaitu sebuah Negara Kepulauan besar yang berciri Nusantara.

Sejak berjalannya reformasi sampai hari ini sudah berlangsung 12 tahun, reformasi justru menghapus Garis Besar Haluan Negara, maka Indonesia tidak memiliki *road map* untuk pembangunan nasionalnya. Memang ada pola pembangunan nasional jangka panjang. Tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai Garis Besar Haluan Negara. Karena pola itu disusun berdasarkan Undang-undang biasa, yang awalnya disusun oleh Presiden terpilih. Sedangkan Garis Besar Haluan Negara disusun oleh seluruh rakyat Indonesia dengan potensi-potensi yang ada. Dalam bentuk Undang-undang maka PJPN ini dengan mudah dirombak, karena sangat tergantung dari kondisi politik yang sedang berkuasa. Padahal untuk menjadikan Indonesia sebuah Negara Kepulauan menjadi Negara Maritim, apalagi Negara Maritim yang besar, kuat, dan makmur, membutuhkan Road Map Pembangunan Jangka Panjang (GBHN).

Pembangunan Maritim Berbasis Perikanan dan kelautan

Produk Domestik Bruto pertahun menunjukkan bahwa kelautan dan perikanan menyumbang 10,3% dengan tingkat pertumbuhan positif pada harga konstan. Dapat diartikan bahwa kontribusi sektor perikanan dan kelautan mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Dan tidak bisa dianggap remeh dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, Kesejahteraan masyarakat yang berada di pesisir sangatlah rendah, bahkan lebih rendah dari masyarakat yang berfokus pada pembangunan di sektor

lain. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis data pada maret 2012, jumlah masyarakat miskin di indonesia mencapai 29,13 Juta jiwa, atau 11,96 % dari total penduduk Indonesia. Dari data tersebut sekitar 65% nya merupakan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Di sisi lain pada bidang ekologi, Indonesia tercatat sebagai negara dengan proses pembangunan perikanan dan kelautan yang kurang dari pada negara yang lain. Hal ini dapat dilihat dari pencemaran perairan laut yang tinggi dengan pembuangan limbah pabrik serta aktivitas kegiatan manusia yang secara sistemis menyebabkan rusaknya perairan laut. Di tambah dengan *overfishing* yang menimpa beberapa stok ikan diperairan Utama Jawa, dan Laut Sulawesi. Di perparah dengan rusaknya habitat seperti hutan mangrove, terumbu karang serta ancaman perubahan iklim.

Untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, maka harus ada penyamaan dan penyatuhan orientasi pembangunan Ekonomi basis maritim. Orientasi ini harus menjadi visi dari pembangunan secara nasional yang dilaksanakan oleh segenap warga negara Indonesia. Tujuan dari orientasi ini adalah membuat visi bersama untuk memanfaatkan ekosistem perairan secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Untuk itu maka perlu menjadikan sektor perikanan dan kelautan ini sebagai *leading sector* yang harus memenuhi berbagai macam aspek pembangunan seperti, (1) sektor perikanan dan kelautan harus memberikan dampak ekonomi makro secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto, (2) Sektor Perikanan dan kelautan harus secara kongkret memberikan keuntungan yang signifikan pula terhadap pelaku usaha agar terciptanya peningkatan kesejahteraan para pelaku perikanan dan kelautan yang pada saat ini masih sangat tertinggal di bandingkan dengan sektor lainnya, (3) Harus ada permerataan kesejahteraan yang signifikan pula terhadap kesejahteraan rakyat yang bertumpu pada pengembangan industri perikanan dan kelautan. (4) pembangunan perikanan dan kelautan harus dilaksanakan secara berkesinambungan tidak hanya pada segi ekonomi saja namun pada sektor perkembangan peradaban masyarakat pun harus mengikuti sehingga tercipta harmoni dalam pembangunan sosial maupun ekonomi.

Untuk mewujudkan orientasi yang akan dijadikan visi seperti diatas maka perlu sebuah strategi pembangunan ekonomi yang menyeluruh, pada dasar pembangunan Negara Maritim Indonesia basis Perikanan dan Kelautan, men-

gingat dengan potensi yang semakin besar pada permintaan namun penawaran produk masih sangat rendah maka perlu ada penggalakan kembali ekonomi maritim kepada masyarakat sehingga pengembangan kegiatan maritim yang ditekankan pada basis perikanan dan kelautan akan semakin kuat dan dapat mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya maupun dari sektor dasar pembangunan ekonomi lainnya. Peningkatan industri di Indonesia sekarang menjadi salah kaprah dikarenakan hanya berfokus pada padat modal, namun pada peningkatan sektor perikanan dan kelautan ini memang akan cenderung padat modal, namun padat teknologi dan juga padat karya. Pentingnya sifat padat karya ini akan memandang karakteristik industri yang terbuka peluangnya bagi masyarakat untuk mengikuti masa pemagangan secara leluasa sehingga pada waktunya nanti akan tercipta pengelolaan industri serta pembangunan perikanan dan kelautan yang tersinergis.

Sebagai penggerak dan pengelola maka perlu dikembangkan berbagai institusi perikanan dan kelautan yang terintegrasi dengan pendidikan, baik yang bergerak dalam bidang produksi, pemasaran, jasa, maupun dengan bidang penelitian. Hal ini dilakukan untuk merangsang ketertarikan dari pengusaha nasional agar mau berpartisipasi dalam pembangunan nasional basis perikanan dan kelautan. Pola investasi sentralisasi juga harus diubah agar pemerataan investasi pada daerah – daerah terpencil juga mendapatkan tambahan investasi yang mumpuni untuk bergerak membangun industri perikanan dan kelautan. Untuk langkah taktisnya perlu ada kawasan *free bounded area* yang berbasis pada perikanan dan kelautan, dengan tambahan nilai sosial untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi basis perikanan dan kelautan perlu diadakan perubahan kultur serta etos hidup masyarakat yang harus diorientasikan pada dunia kelautan. Masa – masa yang paling fundamental adalah kelengahan dalam mengantisipasi tuntutan kebutuhan masa mendatang untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara ini, maka perlu ada antisipasi yang terintegrasi dengan berbagai aspek pengembangan ekonomi dan sosial. Untuk itu harus ada strategi yang jelas dalam pengembangan pembangunan ekonomi terlebih dalam basis perikanan dan kelautan.

Strategi Jangka Pendek

Strategi pembangunan perikanan dan kelautan harus terstruktur dan sistematis sehingga tercipta sebuah sinergi antara *stake holder*. Berikut

adalah strategi jangka pendek dari pembangunan perikanan dan kelautan:

Penetapan kebijakan moneter dan fiskal yang pro pembangunan kelautan dan perikanan, Strategi ini merupakan strategi yang pertama harus dilaksanakan, dikarenakan ketika sudah ada dasar untuk bertindak masyarakat akan merasa nyaman dan aman karena ada undang – undang yang telah mengatur dan membantu mereka dalam ikut serta membangun kelautan dan perikanan. Dengan adanya kebijakan yang di keluarkan dari pemerintah untuk peningkatan investasi dan pola produksi maka akan menambah minat investor untuk menanamkan modalnya dan ikut serta mendorong tumbuhnya pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Kebijakan ini tidak hanya pada moneter namun pada bidang yang sangat krusial seperti penurunan bea eksport, atau pengurangan pajak pada sektor maritim akan sedikit mengurangi biaya produksi sehingga daya saing produk akan lebih tinggi di tataran global.

Peningkatan pelestarian ekologi secara menyeluruh, setelah kebijakan yang akan diterapkan pemerintah sudah disahkan maka perlu sebuah dasaran untuk memulai pembangunan ekonomi basis perikanan dan kelautan. Dengan menjamin kelestarian ekosistem dan sumber daya alam pada daerah pesisir dan laut akan membuka lebar potensi yang dapat digali dan dikembangkan. Tanpa strategi ini maka tidak akan dapat terlaksana dengan baik karena potensi yang akan rusak dan semakin bertambah pada rentang waktu. Pemerintah dan pelaku pembangunan juga harus memiliki visi dan tujuan yang sama dalam melestarikan sehingga tidak terdapat tumpang tindih yang menyebabkan *overcollecting* pada satu titik potensi saja. Maka perlu adanya program pengelolaan lingkungan yang terpadu dan bijaksana disetiap kegiatan pembangunannya. Dimana dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan yang kondusif dalam pengelolaan lingkungan sedangkan pelaku usaha melakukan promosi serta pembangunan pada sektor informal lainnya yang mengarah pada visi dan orientasi serta tujuan yang sama.

Peningkatan kinerja dan pembangunan sektor riil untuk mendapatkan devisa negara. Setelah langkah strategis di atas maka saatnya untuk melakukan pembangunan secara sistemik, langkah strategis ini tidak bisa dilakukan dengan baik jika pada strategi jangka pendek sebelumnya tidak berjalan dengan lancar, karena merupakan sebuah struktur yang sistemik. Dalam situasi ekonomi global yang mempunyai

trend menurun maka perlu adanya peningkatan industri dalam negeri yang tinggi sehingga Indonesia tidak hanya menjadi sasaran sebagai konsumen saja tetapi produsen, pada strategi ini maka perlu pembangunan secara signifikan mulai dari infrastruktur sampai sosialisasi kepada daerah pelosok untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan pada tahapan UMKM, pada skala nasional maka perlu adanya investasi asing yang tinggi namun terkontrol serta adanya investasi lokal yang berbasis pemerataan dan kesejahteraan, sehingga terintegrasi antara pembangunan di pusat dan daerah pelosok untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi basis perikanan dan kelautan.

3.1 Implementasi riil dari strategi jangka pendek

Untuk memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka pemerintah sudah sewajarnya memberikan perlakuan khusus secara ekonomis kepada pembangunan kelautan dan perikanan mulai dari aspek perencanaan sampai pada pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang optimal. Untuk itu maka penyediaan infratruktur yang merupakan fasilitas ataupun pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus di tingkatkan terlebih lagi yang berkenaan langsung pada maritim, untuk itu juga harus terintegrasi satu sama lain sehingga percepatan implementasi bisa lebih cepat terlaksana. Hambatan yang paling besar dari pembangunan ekonomi basis perikanan dan kelautan ini adalah diperlukannya modal yang sangat besar dan biasanya difasilitasi oleh pemerintah dengan dukungan dari sektor swasta yang berperan banyak. Untuk itu maka swasta yang ikut mendukung harus diberi insentif berupa kebijakan yang mendukung investasi mereka. antara lain meliputi:

Jaminan dari pemerintah kepada pengusaha / investor yang menanamkan modal secara langsung serta kompensasi secara langsung kepada investor yang ikut serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Penyederhanaan administrasi dan perizinan investasi (birokrasi) dengan memberikan pelayanan khusus secara terpadu di Pemda Tingkat II, untuk mewujudkannya bisa dengan membentuk undang – undang otonomi daerah secara khusus melalui perda atau perpres.

Insentif penangguhan bea masuk dan bea masuk tambahan untuk barang-barang modal yang terkait dengan produksi sektor kelautan dan perikanan

Pengurangan pada Pajak Pertambahan Ni-

lai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta Pajak Penghasilan, misalnya untuk penggalakan ekspor non migas, fasilitas perpajakan di bidang PPN dan Ppn BM berupa pajak yang terhutang tidak dipungut dan penangguhan pembayaran PPN untuk impor barang modal serta peralatan mesin yang akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang ekspor, seperti komoditi kelautan dan perikanan.

Penurunan tingkat suku bunga kredit untuk investor yang ikut serta dalam pembangunan ekonomi perikanan dan kelautan, yang dahulu sekitar 21 – 22% menjadi kisaran normal sebesar 4 – 6% hal ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan modal kecil. Dan juga dapat meringankan beban produksi baik mikro maupun usaha makro.

Pembayaran pajak dikenakan pada saat hari ramai pengunjung (*tax holiday*) dikenakan pada usaha-usaha kelautan dan perikanan yang umumnya mempunyai jangka waktu tanam yang lama dan bersifat *slow yielding* (tidak cepat menghasilkan) dan penuh dengan ketidakpastian.

Strategi Jangka panjang

Secara visioner dengan arahan pembangunan jangka panjang dalam pola strategi pembangunan perikanan dan kelautan dapat dijabarkan sebagai berikut : (1). Penyediaan sistem terpadu dan terpusat dalam sistem informasi kelautan maupun informasi pada sektor lainnya, hal ini akan memudahkan untuk berkoordinasi dan memudahkan untuk setiap pelaku pembangunan merancang master plannya secara jangka panjang dengan ketersediaan data yang mencukupi dan mudah di akses. (2) Meningkatkan produktivitas dengan mencari daerah eksplorasi baru dan membatasi armada yang mengeksplorasi secara jenuh dalam satu daerah. (3) Dukungan demografi dengan program transmigrasi nelayan, dari daerah yang sudah berpotensi minimal ke perairan yang masih berpotensi tinggi dan belum tereksplorasi sehingga terjadi pemerataan dan peningkatan produktivitas secara merata. (4) Membangun desa terpadu di pos – pos khusus pariwisata untuk menggerakan perekonomian secara kondusif. (5) Peningkatan aktivitas industri pengolahan untuk menambah nilai pada produk dan menarik tenaga kerja, ini juga dapat dimudahkan dalam pemberian ijin, bantuan dana modal dan kemitraan serta bantuan pemasaran dan promosi. (6) Peningkatan SDM dan modernisasi peralatan sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam produksi. (7) Membentuk lembaga usaha dan penjamin modal untuk UKM kecil menengah. (8) Penetapan regulasi pro rakyat

at yang mendukung kebijakan secara riil, serta peningkatan perjanjian bilateral dengan negara tetangga untuk ikut serta bersama memajukan ekonomi maritim.

Kesimpulan

Untuk meningkatkan persaingan global dalam perekonomian maka Indonesia perlu memperbaiki sistematika pembangunan ekonomi yang sudah ada pada sistematika yang baru ataupun menggali sumber potensial lainnya yang mendukung secara langsung dalam pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menjadi *leading sectoral* dan mampu bersaing dalam kancab perekonomian global. Untuk itu maka perlu pemberantahan dan perubahan pengembangan perekonomian ke arah maritim yang sangat potensial. Terutama pada sektor perikanan dan kelautan, sektor ini akan memberikan dampak ekonomi makro secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto, Sektor Perikanan dan kelautan akan secara kongkret memberikan keuntungan yang signifikan pula terhadap pelaku usaha dituntut untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi sehingga nanti akan ada peningkatan kesejahteraan para pelaku perikanan dan kelautan yang pada saat ini masih sangat tertinggal dibandingkan dengan sektor lainnya, akan ada pemerataan kesejahteraan yang signifikan pula terhadap kesejahteraan rakyat yang bertumpu pada pengembangan industri perikanan dan kelautan. Namun Pembangunan perikanan dan kelautan harus dilaksanakan secara berkesinambungan tidak hanya pada segi ekonomi saja namun pada sektor perkembangan peradaban masyarakat pun harus mengikuti sehingga tercipta harmoni dalam pembangunan sosial maupun ekonomi.

Untuk meningkatkan sektor maritim sebagai pola pengembangan ekonomi makro secara nasional maka perlu ada kebijakan dari pemerintah yang mendukung dan melegalkannya sebagai sebuah acuan publik untuk membangun dan menyalurkan investasi, perlu ada perbaikan infrastruktur sehingga daerah pesisir tidak lagi menjadi daerah tertinggal dan dapat berkembang dengan pesat. Regulasi yang jelas, pada regulasi harus disesuaikan dengan iklim investasi tanpa merugikan masyarakat lokal sebagai *local genius*. Dan yang terakhir harus ada pencapaian jangka panjang sehingga program perpindahan potensi alisasi pertumbuhan ekonomi ini akan berjalan secara berkala dan dapat terfokuskan.

Strategi dalam capaian jangka pendeknya , dalam hal ini penggerak dan pengelola perlu dikembangkan berbagai institusi perikanan dan kelautan yang terintegrasi dengan pendidikan, baik yang bergerak dalam bidang produksi, pemasaran, jasa, maupun dengan bidang penelitian. Hal ini dilakukan untuk merangsang ketertarikan dari pengusaha nasional agar mau berpartisipasi dalam pembangunan nasional basis perikanan dan kelautan. Pola investasi sentralisasi juga harus diubah agar pemerataan investasi pada daerah – daerah terpencil juga mendapatkan tambahan investasi yang mumpuni untuk bergerak membangun industri perikanan dan kelautan. Untuk langkah taktisnya perlu ada kawasan *free bounded area* yang berbasis pada perikanan dan kelautan, dengan tambahan nilai sosial untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi basis perikanan dan kelautan perlu diadakan perubahan kultur serta etos hidup masyarakat yang harus diorientasikan pada dunia kelautan. Masalah yang paling fundamental adalah kelengahan dalam mengantisipasi tuntutan kebutuhan masa mendatang untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara ini, maka perlu ada antisipasi yang terintegrasi dengan berbagai aspek pengembangan ekonomi dan sosial. Untuk itu harus ada strategi yang jelas dalam pengembangan pembangunan ekonomi terlebih dalam basis perikanan dan kelautan

Daftar Pustaka

- Bengen, Dietrich. 2010. Perspektif pembangunan negara maritim. Indonesia maritim institute, Jakarta.
- BKTRN. 30-31 Oktober 2002. Proceeding Seminar Nasional : Pengaruh Global Warming terhadap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari kenaikan permukaan air laut dan banjir, Jakarta,
- Tridoyo, Kusumastanto, 2000, Perencanaan dan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil, Makalah pada Loka-karya Pendekatan Penataan Ruang dalam Menunjang Pengembangan Wilayah Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Ja-

karta
Wibisono , Makarim. 2003 Kebijakan Pengembangan Infratruktur mendukung pembangunan ekonomi maritim kawasan selatan Indonesia, Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta.